



## PIDATO

PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  
DENGAN ACARA PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR TERHADAP  
RANPERDA PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN BERUSAHA DAN  
PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP  
RANPERDA TENTANG APBD TAHUN 2025  
SENIN, 4 NOVEMBER 2024

*ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.*

YTH. PLT. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
YTH. WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
YTH. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, PIMPINAN OPD,  
DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
YTH. PIMPINAN PT.BANK NAGARI DAN PIMPINAN BUMD  
YTH. REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pagi hari ini kita kembali dapat melaksanakan Rapat Paripurna Dewan dengan agenda :

1. Pandangan Umum Fraksi-Frakasi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

2. Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha, dan

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Hari ini, Senin tanggal 4 November 2024, dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Frakasi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2025 dan Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... ( Ketokan Palu 3 Kali ).

***Sdr. PLT. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;***

Pada Rapat Paripurna tanggal 1 November 2024 kemaren, Pemerintah Daerah telah menyampaikan secara resmi Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Dari muatan Ranperda APBD tersebut, kita

dapat melihat bahwa rencana anggaran, baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah, jauh berkurang dari target tahun sebelumnya.

Pada pos PAD, terjadi penurunan yang cukup tajam sebesar lebih kurang Rp. 600 milyar sebagai dampak dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023. Demikian juga dengan pos pendapatan transfer, alokasi TKDD tahun 2025 berkurang dari alokasi tahun sebelum, oleh karena fokus Pemerintah masih pada penyelesaian IKN dan penyediaan alokasi anggaran untuk program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih.

Sedangkan dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya, juga terdapat penurunan yang cukup tajam. Hal ini disebabkan oleh karena penetapan SILPA tahun sebelumnya, tidak diperhitungkan dengan cermat, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah.

Kondisi ini tentu menjadi tantangan yang tidak mudah bagi Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memenuhi

kebutuhan anggaran pada tahun 2025, baik untuk pencapaian target kinerja RPJMD Tahun 2021-2026, pencapaian target base line RPJPD Tahun 2025-2045 serta pemenuhan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat imperative.

***Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;***

Sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda APBD, terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2025 yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah, Fraksi-Fraksi akan memberikan pula Pandangan Umum Fraksinya yang berisikan pandangan, tanggapan, masukan dan saran terhadap muatan Ranperda APBD Tahun 2025 tersebut.

Berkenaan dengan hal dimaksud, Fraksi-Fraksi tentu telah menyiapkan Pandangan Umum Fraksinya yang akan disampaikan pada Rapat Paripurna ini.

Untuk itu, kepada masing-masing Fraksi, kami persilahkan menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya secara bergantian.

1. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PKS  
.....
2. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra

- .....
- 3. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai Golkar  
.....
- 4. Ketua atau Juru Bicara Fraksi NasDem  
.....
- 5. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PAN  
.....
- 6. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat  
.....
- 7. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PPP  
.....
- 8. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PDI-P dan PKB  
.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua atau Juru Bicara Fraksi .....yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2025.

***Sdr. PLT. Gubernur dan Rapat Paripurna yang Kami Hormati;***

Dalam Pandangan Umum yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi, cukup banyak pertanyaan dan tanggapan yang diberikan terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang diusulkan dalam Ranperda APBD Tahun 2025 serta kebijakan strategis dalam perencanaan

anggaran pada Tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk melengkapi dan menyempurnakan Ranperda APBD Tahun 2025 yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan tahapan pembahasan, terhadap Pandangan Umum yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi tersebut, akan diberikan pula jawabannya oleh Gubernur. Untuk itu, kiranya Saudara Gubernur dapat pula menyiapkan jawaban atau tanggapannya terhadap Pandangan Umum tersebut yang akan disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan besok.

Kami berharap, jawaban atau tanggapan Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi nanti, dapat menjelaskan dan menjawab secara utuh pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh masing-masing Fraksi, sehingga terbangun persepsi yang sama antara Fraksi-Fraksi dengan Pemerintah Daerah terhadap Ranperda APBD Tahun 2025.

Dengan telah disampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 kita masuk pada agenda berikutnya yaitu

Penyampaian Nota Pengantar terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha

***Sdr. PLT. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami Hormati;***

Sesuai dengan Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, pada tahun 2024 direncanakan akan dibahas dan ditetapkan sebanyak 18 Ranperda. 4 Ranperda merupakan usul DPRD dan sebanyak 5 merupakan usul dari Pemerintah Daerah serta 6 Ranperda luncuran tahun 2023 dan 3 Ranperda kumulatif terbuka. Sampai pada akhir Oktober 2024, realisasinya masih rendah. Dari 18 target tersebut, baru 4 Ranperda yang ditetapkan, 4 dalam proses pembahasan dan 10 Ranperda belum lagi disampaikan dan dibahas oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah.

Ini tentu perlu menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, untuk dapat mengambil langkah-langkah percepatan penyampaian dan pembahasan Ranperda yang telah ditetapkan dalam Propemperda Tahun 2024, agar target Propemperda Tahun 2024 dapat kita wujudkan.

Berkenaan dengan pembentukan Ranperda yang telah direncanakan dalam Propemperda Tahun 2024, Gubernur Sumatera Barat dengan surat Nomor : 180/1435/Huk-2024 tanggal 11 Oktober 2024 telah menyampaikan kepada DPRD, usul pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha.

Ranperda ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang tujuannya untuk menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan meningkatkan daya saing daerah. Dengan terciptanya iklim yang kondusif, akan mendorong masuknya investasi ke Sumatera Barat yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat di Sumatera Barat.

Berhubung Ranperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha telah masuk dalam Propemperda Tahun 2024 dan sesuai dengan agenda kegiatan DPRD yang ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah, maka pada rapat paripurna ini PLT. Gubernur Sumatera Barat akan

menyampaikan Nota Pengantar terhadap Ranperda tersebut.

Untuk itu, kepada Sdr. PLT. Gubernur Sumatera Barat kami persilahkan.

.....  
Penyampaian Nota Pengantar Ranperda  
Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha  
.....

Terima kasih kami sampaikan kepada PLT. Gubernur Sumatera Barat yang telah menyampaikan Nota Pengantar terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh PLT. Gubernur, kita sudah dapat mengetahui dan memahami bahwa dalam Ranperda ini akan diatur terkait dengan penyelenggaraan penanam modal, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil serta materi lainnya terkait dengan perizinan berusaha di Sumatera Barat.

Sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda yang diatur dalam Pasal 9 ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2018, Fraksi-Fraksi akan memberikan Pandangan Umum Fraksinya. Berkenaan dengan hal tersebut, kiranya Fraksi-Fraksi dapat menyiapkan Pandangan Umum Fraksinya terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha yang akan disampaikan pada Rapat Paripurna besok, Selasa tanggal 5 November 2024.

***Sdr. PLT. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;***

Dengan telah disampaikannya Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2025 dan Nota Pengantar terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha, maka berakhir pulalah rapat paripurna kita pada hari ini.

Sebelum rapat ini ditutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terhadap hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan mengucapkan “  
Alhamdulillahilalamin” rapat paripurna DPRD dalam  
rangka penyampaian Nota Pengantar Ranperda  
Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha dan Pandangan  
Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda APBD Tahun 2025,  
secara resmi kami tutup.

..... (ketukan palu 3 x)

***Terima Kasih***  
***Billahitaufiqwalhidayah***  
***Wss.wr.wb***